

## **ABSTRAK**

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadikan pembangunan sebagai salah satu upaya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara, tetapi juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah terhadap lingkungan hidup. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material dalam hal ini kemajuan dalam bidang ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu kerusakan lingkungan akibat pembangunan di Indonesia yang kemudian menimbulkan kesadaran akan perlunya konstitusionalisasi norma hukum lingkungan seiring dengan usaha untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positive yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundangan-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan atau suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan impleentasi dari kajian mengenai lingkungan hidup.

Hasil dari analisis dan penelitian ini bahwa penulis berpendapat bahwa peran Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mengeluarkan izin sangat besar karena menjadi landasan dikeluarkannya izin lingkungan mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan perubahan selama 20 Tahun sekali, maka diharapkan dalam pembentukannya Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya.maka dari itu penulis berpendapat agar dibuatkan raperda perubahan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan dibuatnya pengadilan lingkungan supaya lingkungan tetap terjaga dan masalah lingkungan ini diselesaikan dalam mekanisme pengadilan lingkungan.

Kata kunci : Pembangunan Berbasis Lingkungan Hidup

## **ABSTRACT**

*Republic of Indonesia is a developing country that makes a development as one of the solutions to advance and improve the welfare of citizens however it also has a negative impact to, one of which, the environment. Usually, the development is mostly meant is a financial which is the economic development. The negative impact to environment is an environmental damage due to the development in Indonesia which leads to the realization that the country needs to run constitution of environmental law norms along with efforts to strengthen democracy and the rule of law.*

*The method employed in this research is a normative juridical approach. A study that emphasizes legal studies and conducts a positive legal inventory related to the effectiveness of legislation. Data collection technique was done by studying the documents to obtain secondary data. Document study is done by examining several legal documents, collecting legal materials from print media and electronic media, also using systematic method which is the collection of legislation to look for the link of formulation or a legal concept or a legal proposition that closely related to the implementation of environmental study.*

*The result is the author argue that Regional Spatial Plan role in issuing permits is very important because it is the basis for the issuance of environmental permits which thinking the Regional Spatial Plan changes every 20 years hence, it is expected that the Regional Spatial Plan should be based on higher regulations above it. Therefore, the author argues that the government can make a Regional Regulation (Raperda) changes to Rembang Regency Regional Regulation concerning Regional Spatial Plan and make an environmental court so that the environmental is maintained and the environmental damage could be resolved by environmental court mechanism.*

*Keyword : Environmental Based Development*